
PERAN AGAMA DALAM MEMPERKUAT INTEGRASI NASIONAL (DALAM PRESPEKTIF SEJARAH)

Abd. Rasyid Rahman

Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran agama dalam menjaga integritas bangsa, dan menjadi solusi berbagai konflik struktural dan horizontal di berbagai daerah di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah; penerapan kandungan emosional keagamaan yang melampaui batas, serta meningkatnya pengagungan terhadap suku dan etnik. Tantangan yang harus kita pikirkan bersama adalah merumuskan secara sadar dan tulus mengenai peran nilai-nilai keagamaan, moral dan etik dalam membina kerukunan, persatuan, kohesi sosial, integrasi nasional, serta ketahanan nasional dalam era globalisasi. Kemitraan umat beragama antar bangsa dan negara perlu dibina dalam kerangka membina ketahanan regional, sebab dengan terciptanya, ketahanan nasional dan ketahanan regional, dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuan dalam pembukaan UUD 1945.

Kata kunci : sejarah, agama, integrasi nasional, bangsa.

Abstract

This paper demonstrates the ways religion has the role in maintaining the nation's integration and becomes solution to the many structural and horizontal conflicts in various regions in Indonesia where one of the causes of these conflicts was the emotional religious implementation that went too far and tended to valorize one's ethnic group. The challenges which we need to think together is consciously formulate the role of religious, moral and ethical values to maintain harmony, unity, social cohesion, national integration, and national security in the age of globalization. Partnership among religious believers, among nations and states need to be strengtened to promote national and regional security to achieve the nation's goals as stated in the opening paragraph of the 1945 Constitution.

Keywords: history, religion, national integration, nation

PENDAHULUAN

Keberadaan agama, khususnya agama Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai peranan penting dan utama. Pada strata filosofi secara universal dalam dimensi nilai, agama Islam berisi kandungan normatif nilai-nilai spritual dan moral dalam Hubungan tri dimensi, yakni umat Islam dengan Allah Swt, umat Islam dengan umat agama lain, dan umat Islam dengan lingkungannya. Hubungan ini sesuai dengan penegasan *Al-Qur'an* Surah Ai-Hujurat, 13: "Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki sorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal".

Dalam konteks kehidupan masyarakat bangsa yang menegara, agama Islam mampu berfungsi sebagai sumber kekuatan spiritual, moral dan etik. Sehubungan dengan ini. Nilai-nilai spiritual keagamaan, terutama Agama Islam sangat kuat mendorong umatnya untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan hidup, serta menghilangkan keresahan, kegelisahan hati, pertentangan (konflik sosial).

Sebagai kekuatan moral dan etik. agama Islam memiliki kaidah-kaidah yang berfungsi memberikan tuntunan dan pedoman hidup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kebanggaan, serta kenegaraan *Al-Qur'an* surah Ai-Isra' ayat 9; "sesungguhnya *Al-Quran* memberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Dalam dimensi lain A Nian (1986) menegaskan; agama dapat membentengi manusia dari pengaruh negatif transformasi nilai sosial budaya yang semakin kuat dan kompleks di masa depan. Sementara itu, R. Strothmann dalam B.J. Brifl (1961) menegaskan; Islam di samping sistem agama telah pula merupakan sistem politik, dan Nabi Muhammad di samping Rasul telah pula menjadi seorang

ahli negara.

Pada tataran makro hubungan antar umat beragama, agama Islam mampu berperan sebagai inspirator maupun motivasi perkembangan sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam tataran idealisme, kandungan nilai spiritual, moral dan etik dalam proses kehidupan nasional, agama sarat dengan kandungan emosional, pada satu sisi memberi tuntunan keimanan dan ketaqwaan menuju kebahagiaan dan ketentraman di dunia dan di akhirat.

Pada sisi lain sejarah membuktikan bahwa muncul kecenderungan negatif sebagai hal yang tidak terhindarkan, dimana agama dapat pula menghadirkan "fanatisme sempit" yang setiap saat begitu mudah menimbulkan konflik sosial bahkan perang, seperti perang salib antara umat Islam dengan umat Kristen, konflik antara umat Kristen Katolik dan Protestan di Irlandia Utara, umat Islam dan Hindhu di Kashmir. Terkait dengan kondisi ini Sutrisno (1997) menegaskan; perbedaan doktrin keagamaan yang kemudian berkembang rasa kebencian antar umat beragama menjadi sebab utama dari munculnya konflik.

Terlepas dari munculnya kecenderungan negatif itu, peranan penting eksistensi agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diakui secara historis dan politis oleh *the founding father* Indonesia. Sidney Hook dkk, (1987) menegaskan; Islam mengakui bahwa masyarakat merupakan bagian dari tujuan-tujuan, tujuan menjadi mahluk. Islam percaya bahwa individu merupakan tujuan dalam dirinya, dan negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan itu.

Secara historis, ajaran agama Islam mampu memotivasi umat Islam untuk rela mengorbankan jiwa raga untuk mengusir kaum imperialisme sekaligus merebut kemerdekaan, sedangkan secara politis, agama Islam menempati posisi yang sangat fundamental di dalam Pancasila,

dimana *the founding father* telah menunjukkan kearifan pokok-pokok pikiran kebangsaan dengan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama, Soemardjan. dkk. (1992).

Selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 para *the founding father* telah merumuskan kearifan pokok-pokok pikiran dalam bentuk mengaktualisasikan nilai-nilai religius, moral dan etik, seperti; rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya tidak hanya di dorong oleh keinginan luhur, kehidupan kebangsaan yang bebas, tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dalam Penjelasan UUD 1945 pokok pikiran keempat ditegaskan; negara berdasar atas' Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, idealnya Undang-undang yang dilaksanakan di Indonesia me-wajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Amanat Pembukaan UUD 1945 sebagaimana ditegaskan di atas, dijabarkan lagi pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Dalam proses perumusan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, *the founding father* telah menunjukkan kearifan dan toleransi yang sangat tinggi, dengan sepakat menghapus anak kalimat; "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Ketupah kalimat inilah yang pada SU MPR tanggal 1-18 Agustus 2000 diperdebatkan kembali oleh Komisi-Komisi MPR, dan akhirnya pasal 29 UUD 1945 tidak jadi di amandemen.

Untuk merealisasikan peran agama dalam pembangunan nasional, dalam setiap GBHN yang ditetapkan oleh MPR

RI tetap dicantumkan pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan⁵ dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta aktif umat beragama dalam pembangunan. Kehidupan beragama sebagai nilai luhur bangsa merupakan usaha bersama meningkatkan landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan guna mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya dan memantapkan kerukunan antar umat beragama.

Patut kita sadari bersama, bahwa kondisi umat beragama di Indonesia dewasa ini masih menghadapi berbagai masalah dimana agama sebagai landasan spiritual, moral dan etik belum diaktualisasikan secara mantap. Kehidupan sosial kemasyarakatan kurang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan sehingga berakibat degradasi moral dan perilaku, serta masih adanya permasalahan kerukunan hidup interen dan antar umat beragama Kondisi inilah yang. menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik horizontal, seperti yang terjadi di Maluku, Poso, Kupang, dan Mataram.

METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode sejarah, yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu, pengumpulan data, kritik, interpretasi, dan penulisan. Pada tahap ini kegiatan diarahkan kepada pengumpulan dan penghimpun sumber data berupa jejak, dan perincian serta pengumpulan fakta-fakta sejarah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer baik berupa wawancara kepada tokoh yang terkait dengan fokus penelitian atau memiliki kapasitas dalam menjawab per-

soalan penelitian, maupun berupa dokumen, arsip, dan catatan harian.

Kemudian, pada tahapan kerja kritik atau penilaian data merupakan kegiatan menganalisa data yang telah diperoleh, guna memperoleh data yang otentik. Hal ini dilakukan, karena tidak semua data yang didapatkan dapat dijamin keobjektifitasnya. Ini disebabkan karena adanya keinginan menonjolkan satu golongan atau dapat juga daya ingat pelaku sudah berkurang, atau informan hanya mendengarkan cerita orang lain, sehingga dapat menambah atau mengurangi keabsahan data. Untuk mengolah data menjadi fakta diperlukan kritik sejarah, tujuan kritik keseluruhannya adalah untuk menyelidiki data menjadi fakta. Dengan demikian fakta adalah data yang sudah lulus uji, dengan kritik yang berdasarkan hukum-hukum metode sejarah. Setelah melalui kritik sumber, fakta-fakta yang didapatkan kemudian diinterpretasikan, tujuannya adalah untuk memberikan arti atau makna kepada suatu peristiwa. Penafsiran dilakukan dengan jalan memberi penjelasan terhadap fakta-fakta sejarah seobjektif mungkin. Penulisan (historiografi) merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses pengolahan dan penyusunan sumber-sumber sejarah, yaitu menyusun atau merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah. Pada penulisan karya ini penulisan sejarah dengan bersifat deskriptif historis, yaitu berupa penggambaran peristiwa-peristiwa sejarah.

PEMBAHASAN

Agama dan Integrasi Nasional.

Sebagaimana ditegaskan pada bagian pendahuluan, aspek keagamaan masih merupakan suatu hal dengan kandungan kerawanan emosional, memiliki kekuatan motivasi yang tinggi, dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi benih-benih disintegrasi dan retaknya kohesi sosial (persatuan dan kesatuan) akibat heterogenitas serta tingkat kematangan masyarakat

yang berbeda dalam menyerap nilai-nilai religius, moral dan etik.

Terjadinya berbagai konflik struktural dan horizontal di berbagai daerah di Indonesia salah satu penyebabnya adalah; penerapan kandungan emosional keagamaan yang melampaui batas, serta meningkatnya pengagungan terhadap suku dan etnik. Padahal umat manusia pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang diturunkan Oleh Allah Swt kemuka bumi sebagai khalifah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, 213; "Manusia adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan", lihat juga surah Hud, 118.

Kecenderungan di masa mendatang, tata kehidupan masyarakat Indonesia sangat diwarnai oleh berbagai proses perubahan yang cepat dan kompleks disegala aspek kehidupan. Proses perubahan tersebut didorong oleh kemajuan IPTEK dan kecanggihan media informasi akibat *tripel T revolutor: (Transportation, telecommunication, trade)* serta kecenderungan mengedepankan sikap rasional. Fenomena ini mendorong terjadinya pergeseran atau perubahan nilai-nilai sosial, lahirnya berbagai masalah sosial dan keagamaan, terutama dalam hubungan antar umat beragama akibat tidak semua warga masyarakat maupun umat beragama mampu mengadaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan dan arus globalisasi.

Konsekuensi logis dari perubahan sosial dan dampak globalisasi di masa depan adalah, pada satu sisi akan terbuka peluang untuk memanfaatkannya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, namun sisi lainnya, mereka yang tidak mampu mengadaptasi atau menyesuaikan diri akan semakin tertinggal dalam suasana keterbelakangan, yang akhirnya memunculkan rasa kecewa, frustrasi. dan keputusasaan. Bagi mereka yang lemah

iman dan taqwanya serta ketidakstabilan emosionalnya dengan mudah melakukan perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai religius, moral dan etik. Umat Islam harus menyadari sepenuhnya penegasan Al-Qur'an, Al-Hujuraat, 13; "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu".

Ditinjau dari berbagai perkembangan yang global (mendunia), hubungan antar bangsa dan antar umat manusia banyak diwarnai kepentingan ekonomi suatu negara. Bersamaan kehadiran kekuatan ekonomi baru diberbagai kawasan duna, tampil pula isu-isu HAM, Demokrasi. Penegakkan Hukum, dan Lingkungan hidup. Dalam kaitan ini tidaklah mengherankan ada sebagian negara maju tidak rela disaingi, dan mereka melakukan tekanan-tekanan pada kekuatan ekonomi, pemanfaatan kecanggihan teknologi, serta penguasaan media informasi melakukan berbagai intervensi terhadap negara-negara sedang berkembang, dan intervensi yang paling ampuh mereka lakukan adalah isu-isu religius, HAM, demokrasi, pemerataan pendidikan, dan kesenjangan ekonomi. Segala intervensi tersebut memberi kontribusi lahirnya konflik struktural dan horizontal -diberbagai kawasan dunia, terutama negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Globalisasi cenderung mendorong ekonomi (materialisme) menjadi primadona, dan selalu mengabaikan nilai-nilai religius, moral dan etik. Kepentingan ekonomi telah menjadi sentral kepentingan dan masalah nasional, S. Budisantoso (1995), dan konsekuensinya, kekuatan yang bersifat fisik material menjadi pilihan utama daripada kekuatan bersifat abstrak seperti; semangat ke-bangsaan, pengamalan ajaran agama- serta penghormatan terhadap morlitas dan etika bangsa, sehingga timbul tala kehidupan yang individualis, materialis, dan konsumeris.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi umat beragama di Indonesia harus meningkatkan sains dan teknologi, serta kembali ke peningkatan pengamalan ajaran agama Muthahhara (1992) menegaskan; sains memberi kita kekuatan dan pencerahan, sementara keimanan mengilhami kita tentang apa yang mesti kita kerjakan. Sedangkan Amsyari (1990) menegaskan; dengan mendudukkan sains-teknologi sebagai salah satu sumber acuan Islam, umat Isiam akan mampu secara profesional bersaing dalam era pembangunan yang semakin rumit dan canggih tanpa kehilangan identitasnya.

Sementara pemikir orientalis Srich Fromm dalam Muthahhari (1992) menegaskan; tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan agama sebagai penuntunnya dan pengatur cinta dan kepentingan-kepentingannya, dan George Sarton mengakui bahwa jenis keimanan yang dibutuhkan oleh manusia adalah agama Agama, seni, dan sains sangat dibutuhkan oleh negara.

Perilaku ekonomi global cenderung mencungkir-balikkan berbagai nilai tradisional yang bertumpu pada kehidupan dan kohesi sosial (integrasi sosial) bahkan pengamalan keagamaan yang utuh, dan menjadikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran agama berada dalam kevakuman. Ditengah derasny pengaruh materialis dan konsumeris inilah kalangan beragama diharapkan bersikap proaktif, terutama memanfaatkan kandungan emosional keagamaan untuk mempersatukan umat beragama dalam sutau tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan selalu mewaspadaai munculnya simbol-simbol religius, kesukuan, rasialis, serta keterbelakangan ekonomi yang dapat merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan (kohesi sosial) serta integrasi nasional.

Dari penalaran di atas dapat disimak betapa dahsyatnya potensi yang dapat muncul dalam dinamika keagamaan,

sebab pada satu sisi dapat memberi motivasi dan semangat pemersatu (integrasi sosial), kerukunan hidup beragama, keuletan dan ketangguhan, serta kadar keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, namun kandungan emosional keagamaan dapat memunculkan kelompok rentan sosial yang kadar keimanannya rendah berakibat lahirnya aksi kekerasan serta sikap kebrutalan sosial.

Pada kondisi sosial kemasyarakatan yang rendah kadar iman dan taqwa inilah yang harus diantisipasi & Indonesia, sebab kadar keimanan dan ketaqwaan rendah, degradasi moral, heterogenitas budaya, suku, etnik dan istiadat, serta daya serap terhadap arus globalisasi yang berbeda, bisa menimbulkan berbagai konflik struktural dan horizontal, seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini.

Disinilah peran penting agama sangat dibutuhkan untuk; meningkatkan daya tahan dan keuletan setiap warga negara dan bangsa Indonesia secara totalitas. Keuletan dan ketangguhan bangsa harus meliputi aspek kehidupan politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, agar tetap terpelihara eksistensi maupun jati diri sebagai bangsa Indonesia serta upaya peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*). Di masa depan bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan di semua aspek kehidupan, yang secara umum kita namakan ketahanan nasional.

Agama Dan Pembinaan Ketahanan Nasional.

Pertanyaan strategis yang diangkat kepermukaan saat ini adalah; Mengapa terjadi de-eskalasi ketahanan nasional saat ini?. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah Orla, Orba, dan Ode Reformasi 'menghianati' peran penting agama dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Ketiga pemerintahan ini tidak pernah serius dalam mengeluarkan kebij-

kan yang bagaimana; mengislamkan umat Islam, mengkristenkan orang Kristen, meng-hindhukan orang Hindhu, dan sebagainya.

Padahal secara historis dan politis, peran agama sangat penting dalam menuntun perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak masa imperialis, kolonialis, dan proklamasi Kemerdekaan. Namun sejak kemerdekaan, secara hukum dan pemerintahan seakan peran agama "dipinggirkan" oleh orde lama dan orde baru. Terkait ini, Mehden (1983) menegaskan; para pemimpin Indonesia dan Malaysia melihat para revivalis Islam sebagai sebuah bahaya terhadap negara atau masa depan politik para politisi, kebangkitan Islam dapat membangkitkan ketegangan-ketegangan dan pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengingat pentingnya peran agama dalam merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa maupun dalam upaya penanganan konflik struktural maupun horizontal, niscaya peran agama di era reformasi ini perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan pemerintahan, hukum, demokrasi dan HAM. Tuntutan ini niscaya dilakukan secara nyata mengingat betapa strategisnya peran nilai-nilai religius, moral dan etik dalam memperkuat persatuan, kesatuan, kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.

Selaras dengan upaya pembinaan ketahanan nasional, seharusnya para penyelenggara negara dan elit politik memikirkan bagaimana mengindonesiakan orang Indonesia yang sangat heterogen dari segi agama, etnik, suku, bahasa, dan adat istiadat. Kondisi ini sangat rawan bila tidak diberlakukan sama di depan hukum, pengadilan, pemerintahan, dan pendidikan. Ingadlah Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-A'raaf, 96; "jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka men-

dustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Disamping itu perlu memaksimalkan dua kemampuan dasar manusia, yaitu kemampuan emosional dan rasional. Kemampuan emosional meliputi sikap nasionalisme, cinta tanah air, serta kesadaran bela negara, yang oleh Cline S. Ray (1975) diidentikkan dengan *critical mass* yang menopang kokohnya *rmilitwy capabi-Uty* suahi negara, dan kemampuan rasional meliputi; kemampuan intelektual dalam bentuk daya nalar, penguasaan sains atau IPTEK.

Kemampuan emosional dan rasional diharapkan mampu mensinkronisasi-keseimbangan dan keselarasan yang dituntun oleh nilai keagamaan, moral dan etik. dan lebih tegas lagi dituntun oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt Sebab, semakin tinggi kadar keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah Swt, semakin tinggi dan kokoh pula tuntunan untuk menyelaraskan kemampuan emosional dan rasional tersebut Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan tinggi semakin mampu menghadapi ancaman maupun tantangan lingkungannya tidak mudah tergoyahkan oleh dinamika perubahan lingkungan, serta tidak tertekan tindakan dan perbuatan yang mengancam disintegrasi sosial.

Secara empirik menunjukkan; semakin tinggi kadar keimanan dan ketaqwaan seseorang yang didukung oleh kemampuan IPTEK, semakin mantap pula ketahanan pribadinya Ketahanan pribadi merupakan esensi dari ketahanan nasional. Sunardi (1997). Mantapnya ketahanan pribadi akan membentuk ketahanan keluarga dan ketahanan keluarga akan membentuk ketahanan daerah sekaligus melahirkan ketahanan nasional, Soedarsno (1997), dan dalam tataran makro mampu mengendalikan keseimbangan

pengembangan sikap emosional dan rasional menuju masyarakat madani maupun *civil society*, serta ketahanan nasional semakin mantap. Ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional yang melahirkan keamanan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat Teori ketahanan nasional ini sejalan dengan penegasan Al-Qar'an; "jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka".

Para penyelenggara negara, elit politik, maupun politisi harus memiliki *political wisdom* serta *political action* dalam membawa masyarakat dan bangsa Indonesia kearah masyarakat adil dan makmur, yang dalam Al-Quran disebut; "baidathnn toyribathun warabbun ghafur" sebab mereka akan dimintai pertanggungjawaban, baik oleh rakyat maupun Allah Swt.

Penyelenggara negara dan elit politik harus menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada masalah fisik yang hanya memerlukan pendekatan rasional belaka, tetapi masalah non fisik yang bertumpu pada kekuatan emosional sangat penting, dan kekuatan emosional perlu direayasa berdasarkan nilai keagamaan, moral dan etik Tidaklah berlebihan jika saya menegaskan bahwa pendekatan religius, moral dan etik harus menjadi landasan. sebab keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt menjadi asas pertama dan utama dalam pembangunan nasional sebagaimana diamatkan oleh rakyat melalui Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.

PENUTUP

Sejarah umat manusia sejak jaman dahulu cukup memberikan bukti dan pelajaran berharga bahwa keberadaan suatu bangsa dapat lenyap apabila kemerosotan moral tidak segera diatasi, dan kehancuran suatu peradaban yang pernah jaya di masa lampau selalu diawali dengan pengikisan terhadap ajaran agama serta adanya kemero-

sotan moral, dan warga masyarakatnya tidak patuh pada hukum. Supremasi hukum dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) wajib kita tegakkan jika masih ingin mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia di masa depan. AL-Quran surah Al-Maaidah; 8 menegaskan; "wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu golongan membuat kamu tidak berlaku adil. Tegakkan keadilan, oleh karena keadilan itu lebih dekai kepada takwa.. /'.

Dewasa ini tantangan yang harus kita pikirkan bersama adalah merumuskan secara sadar dan tulus mengenai peran nilai-nilai keagamaan, moral dan etik dalam membina kerukunan, persatuan, kohesi sosial, integrasi nasional, serta ketahanan nasional. Dalam era paradigma baru maupun di era globalisasi informasi mendatang kemitraan umat beragama antar bangsa dan negara perlu dibina dalam kerangka ketahanan regional, sebab dengan terciptanya, ketahanan nasional dan ketahanan regional, upaya perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan proposisi di atas haruslah secara tajam menganalisis kebijakan nasional, dan kebijakan nasional yang berorientasi kemasa depan yang siap menghadapi tantangan pembangunan yang semakin berat dan kompleks di masa depan. Van Meter (1975). Untuk pemecahan permasalahan bangsa terutama dalam menghadapi heterogenitas agama, suku, etnik, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia niscaya dikembangkan konsepsi pemecahan masalah yang visible dan managable, pemecahannya tidak selalu berada dalam strata konsepsi yang bersifat tematis abstrak, artinya bahwa pemikiran yang dihasilkan itu lebih, bersifat konkrit dan operasional. Pada

akhirnya harus kita sadari bahwa Kehancuran suatu bangsa atau peradaban selalu bersumber dari internal masyarakatnya, jarang terjadi karena faktor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1985, Al-CHir'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Aiftan. 1986. Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional, UI-Press, Cet. L Jakarta.
- Amsyari, Fuad, 1990, Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia, Mizan, Cetakan I, Bandung.
- EriiL E. J., 1961 *Siorte Sncyclopedia of Islam* Leiden, p. 534.
- Ciise S. Ray, 1975, *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Draft. The Center for Strategic and International Studies*, Georgetown University, Washington D.C. P. 11.
- Edwards III, George C, 19&0, *Impiementing Public Policy*, Texas A & M University, Congressonai Ouerterly Press, London.
- Hook, Sidney, rikk. 1987, Hak Azasi Manusia Daiam islam. Obor Indonesia. Cetakan J Jakarta
- Mebden, Fred R. Von Der, 1983, *Islam and State in Indonesia and Malaysia*, Diskusi Forum Komunikasi, Pandji Masyarakat, Jakarta
- Muthahari, Murtadha, 1992, Perspektif Al-Qur*an Tentang Manusia dan Agama, Mizan. Cetakan VI, Bandung.
- S. Budisanioso, 1996, Ketahanan Nasional Dalam Era Globalisasi, Makalah. Lem-hannas, Jakarta, h. 1 - 23.
- Soedarsono. Soemarno, 1997, Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Na-

- sional, Intermasa, Edisi IL Jakarta.
- Soemardjan, Selo, dkk, 1992, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. BP-7 Pusat, Jakarta.
- Sugardo, E di, 1996 Memantapkan Integritas Nasional Selama PJPT II Bina Karya, Jakarta.